

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis pemberitaan polemik kebijakan rotasi dan mutasi pejabat pemerintah Kota Bekasi oleh media online *Transparannews.id* dan *Radarbekasi.id*, dapat disimpulkan bahwa keduanya menggunakan pendekatan framing yang berbeda. *Transparannews.id* cenderung menyoroti ketidaksetujuan dan kekhawatiran dari pihak oposisi, terutama Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, dalam membingkai isu ini. Di sisi lain, *Radarbekasi.id* menampilkan dukungan dari pihak yang mendukung kebijakan tersebut, seperti Partai Gelora dan PKB. Perbedaan framing ini menciptakan narasi yang berbeda terkait kebijakan rotasi dan mutasi, yang dapat memengaruhi persepsi publik.

Kemungkinan adanya perbedaan dalam framing tersebut dapat memberikan dampak signifikan pada cara masyarakat memahami dan merespons kebijakan rotasi dan mutasi pejabat pemerintah Kota Bekasi. Persepsi publik terhadap isu ini dapat dipengaruhi oleh pilihan kata, fokus berita, dan penekanan aspek-aspek tertentu yang dipilih oleh masing-masing media. Oleh karena itu, hasil analisis menunjukkan bahwa perbedaan dalam framing dapat menciptakan keragaman persepsi di kalangan masyarakat terkait kebijakan tersebut. Dengan demikian, penting untuk diakui bahwa media massa memiliki peran krusial dalam membentuk pandangan dan opini publik terhadap suatu isu, dan perbedaan framing antara *Transparannews.id* dan *Radarbekasi.id* dapat memainkan peran penting dalam memahami keragaman persepsi di masyarakat terkait polemik kebijakan rotasi dan mutasi pejabat di Kota Bekasi.

5.2 Saran

Analisis framing pada kedua media ini menunjukkan perbedaan dalam cara berita disusun dan dipresentasikan kepada pembaca. Dalam penelitian lebih lanjut, dapat dilakukan analisis konteks sosial dan politik yang lebih

mendalam untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi framing berita, seperti latar belakang politik dan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik ini. Ini akan membantu dalam memahami perbedaan dalam pemberitaan yang dapat memengaruhi persepsi publik terhadap isu mutasi pejabat di Kota Bekasi.

